IMPLEMENTASI PROGRAM UNIT REAKSI CEPAT DALAM PEMELIHARAAN JALAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMEDANG

**Akadun*, Komala Widyaningsih Wowiling, Hafid Sidik Ansari, Rizka Handayani,
Novi Widya Pratama, Rizki Auguste Rodin**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas April

*Corresponding Email: akadun@unsap.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of the Rapid Response Unit (URC) Program in Road Maintenance by the Public Works and Spatial Planning Office of Sumedang Regency. The research method used in this research is qualitative research. Determination of research informants, namely Social Situation Techniques. With the Head of Highways, Head of the Road and Community Reservation Section. Data collection techniques used, namely library research, and field studies consisting of observations, interviews, and documentation. While the data processing procedures in this study, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification, triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that the Rapid Reaction Unit Program (URC) at the Public Works and Spatial Planning Office of Sumedang Regency had not yet fully run well, although in terms of size and policy objectives were clear, the size and objectives of the policy had not been implemented optimally due to lack of socialization to the community so that there are still many people who are negligent by littering so that it can cause water to evaporate and flood to the streets which will damage the roads. Human resources are still low, the available budget is limited, facilities/infrastructure are still lacking. The inhibiting factors in the Implementation of the Rapid Response Unit Program (URC) at the Sumedang Regency Public Works and Spatial Planning Service include: The distribution of information dissemination has not been disseminated evenly, the weather is sometimes unsupportive because if the weather is rainy the implementation of this program cannot be carried out, even if it is forced, the results will not be maximal and the road endurance will not be long. Facilities and infrastructure are still lacking.

KeyWord: Public Policy, Implementation, Rapid Response Unit

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang saat ini sedang melakukan proses pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembangunan adalah kesiapan dan kondisi infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan dan jembatan. Jalan itu sendiri merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Mannering & Washburn (2013) Economic development has long been recognized that highway construction and improvements to the highway network can positively influence economic development. Such improvements can increase accessibility and thus attract new industries and spur local economies. To be sure, measuring the economic development impacts of specific highway projects is not an easy task because such measurements must be made in the context of regional and national economic trends. Still, the effect that highways can have on economic development is yet another example of the far-reaching economic influences of highway transportation.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur ini juga dapat menjadi peranan penting dalam mendukung proses ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan yang dapat meningkatkan ikatan antar wilayah dalam suatu negara.

Pembangunan jalan itu sendiri diikuti dengan tanggung jawab pemeliharaan, artinya fase pemeliharaan tidak akan dapat dipisahkan dengan fase pembangunan jalan. Upaya pemeliharaan jalan ini sesungguhnya bukan tahapan yang sederhana, dimana tahapan pada proses pemeliharaan masih terkait dengan beberapa proses seperti yang terdapat pada proses pembangunan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan.

	Pembangunan	Pemeliharaan
Pendekatan Pelaksana	Proyek	Proses
Waktu	Relative Singkat/Jangka Pendek	Berjalan terus menerus/Jangka Panjang
Lokasi	Terbatas	Tersebar
Biaya perkilometer	Relative tinggi	Relative rendah
Kebutuhan Keterampilan	Teknik pengelolaan proyek	Teknik pengelolaan bisnis

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum (2005)

Tabel di atas menjelaskan beberapa aspek yang membedakan antara kegiatan pembangunan dan pemeliharaan. Perbedaan pertama ada pada pendekatan pelaksanaan dimana ketika dalam fase pembangunan pendekatannya masih dalam bentuk proyek dan ketika masuk pada fase pemeliharaan tentu pendekatannya berubah menjadi bentuk proses. Perbedaan yang kedua adalah dari segi waktu, untuk pembangunan membutuhkan waktu yang relative singkat dibandingkan dengan fase pemeliharaan karena pemeliharaan berjalan secara terus - menerus. Selanjutnya dari segi lokasi, untuk lokasi pembangunan relative terbatas, sementara untuk pemeliharaan ada pada banyak lokasi (tersebar). Perbedaan lain dapat dilihat juga dari segi pembiayaan, perlu biaya yang relative tinggi untuk pembangunan karena memulai proses dari nol sementara pada pemeliharaan cenderung relative murah karena hanya menjaga agar kondisi jalan tetap dalam keadaan layak pakai. Perbedaan yang terakhir pada kebutuhan keterampilan dimana pembangunan lebih kepada keterampilan proyek pengadaan jalan dan pembangunan lebih pada aspek bisnis dalam artian dapat memmanage keuangan dengan baik.

Jadi, fase pemeliharaan jalan dapat dikategorikan penting dan harus dilakukan oleh setiap daerah untuk menjaga kondisi badan jalan agar tetap dalam kondisi baik. Akan tetapi, teknik pemeliharaan jalan memang tidaklah mudah, banyak sekali kendala yang muncul ketika proses pemeliharaan misalnya kurangnya anggaran, tonasi kendaraan yang sudah melebihi beban jalan raya, kondisi cuaca yang kurang bersahabat dan juga adanya gangguan lalu-lintas ketika proses pemeliharaan.

Kompleksitas permasalahan dalam pemeliharaan jalan terjadi di beberapa kawasan industri. Salah satu daerah industri itu adalah kabupaten Sumedang, dimana kabupaten Sumedang memiliki beberapa industri yang cukup besar, antara lain : PT Karina Kaldu , PT casper Pharmaceutical, PT Sagara Purnama Office, PT. Kordon Putra Sinergi.

Perkembangan industri yang semakin pesat di Kabupaten Sumedang diyakini berdampak pada peningkatan arus mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukannya akses jalan yang memadai guna memperlancar segala aktivitas masyarakat. Baik itu berupa aktivitas pendidikan, kesehatan sampai pada perputaran ekonomi. Namun di sisi lain, penambahan kawasan industri juga dapat membuat badan jalan menjadi cepat rusak karena jumlah dan tonase kendaraan yang melebihi kekuatan dari jalan raya. Selain itu tidak adanya penanganan cepat pada kerusakan awal juga dapat memperparah kerusakan jalan raya dan melemahkan arus pendistribusian barang/jasa. Kerusakan jalan yang semakin parah ini juga akan memakan banyak biaya dan juga waktu dalam proses perbaikannya.

Sebagai salah satu kawasan industri, kondisi jalan di Kabupaten Sumedang juga banyak yang berada dalam kondisi rusak. Seperti yang di ungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa total panjang jalan di Kabupaten Sumedang mencapai 950,79 km. Rinciannya jalan Negara 60,62km, jalan provinsi 115,8Km , jalan kabupaten 774,37 km. Namun dari jumlah itu tidak semuanya dalam kondisi baik, dari jumlah tersebut 17,33% diantaranya dalam kondisi rusak berat. Beberapa factor kerusakan yang disebutkan adalah permukaan jalan, mutu pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan yang kurang bagus, adanya beban peningkatan pemakaian jalan serta peningkatan kualitas pengguna jalan. Dampak dari kerusakan yang berkepanjangan juga dirasakan oleh masyarakat, baik itu yang berasal dari wilayah Kabupaten Sumedang maupun yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sumedang. Mereka banyak mengeluhkan tentang kondisi jalan yang bergelombang, berlubang dan juga sempit.

Permasalahan di atas mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Karena dalam UU No 29 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa “penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Sumedang bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum membentuk sebuah Tim yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi/perbaikan infrastruktur jalan raya meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Losses Assessment) pada jalan yang mengalami kerusakan ringan dan berstatus jalan Kabupaten. Tim ini di beri nama Unit Reaksi Cepat Bina Marga atau di singkat (URC), dimana tim ini bekerja berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang.

Dalam draft Petunjuk pelaksanaan Unit Reaksi Cepat Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Sumedang dijelaskan bahwa fungsi dari URC ini adalah melaksanakan pengkajian awal segera setelah ada laporan kerusakan/pengaduan dari masyarakat, melakukan langkah-langkah perbaikan dengan efektif dan efisien dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala seksie Pemeliharaan jalan dan Jembatan Bina Marga sekaligus memberi input informasi terkait Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pelaksanaan dari Unit Reaksi Cepat ini bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dialami oleh URC BIMA ini adalah kendaraan yang masih berjumlah 2 unit dan tergolong mobil lama, jadi kecepatan menuju lokasi yang di tuju juga tidak dapat dilakukan dengan cepat karena mobil ini sering mengalami kerusakan sehingga penanganan kerusakan jalan yang idealnya dapat ditangani dalam 1x24 jam dapat terselesaikan melebihi batas waktu ideal tersebut. Selain itu layanan hotline (bebas pulsa) yang sudah di pesan khusus untuk pengaduan jalan rusak juga masih terjadi gangguan sampai sekarang Namun mereka tetap dapat menampung banyak informasi dari Whatsapp dan juga twetter.

Dengan program pemeliharaan jalan melalui Unit Reaksi Cepat ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Karena bentuk respon yang cepat dan tepat dari pemerintah dalam melakukan pemeliharaan jalan juga dapat memperlancar arus produksi dan pendistribusian barang sehingga pendapatan daerah juga akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas akses jalan yang diberikan.

Program URC (Unit Reaksi Cepat) ini telah mendapat dukungan yang sangat besar dari masyarakat dikarenakan dapat membantu pengguna jalan dan menimalisir kecelakaan di jalan raya.

Berikut ini adalah data dan hasil observasi awal, peneliti menduga bahwa terdapat indikasi masalah terkait dengan pengimplementasian program Unit Reaksi Cepat (URC) yang dilaksanakan oleh Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, dengan indikasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi untuk Program URC (Unit Reaksi Cepat) ini masih kurang efektif dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak tau apa itu Program URC, dan kegunaan URC (Unit Reaksi Cepat) itu untuk apa, masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui. Contohnya, saat wawancara terhadap beberapa orang di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu Program URC (Unit Reaksi Cepat) ini.
2. Setiap pemeliharaan jalan dilakukan sesuai dengan SOP yang ada, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa jalan tersebut akan beratahan lama. Pasti ada saja jalan yang retak dan berlubang perminggunya ataupun perbulan. Jalan yang retak dan berlubang salah satunya disebabkan oleh saluran air yang meluap dan akhirnya menggenangan di jalan. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi pemeliharaan jalan pada masyarakat sekitar, agar tetap menjaga lingkungannya, dan tidak membuang sampah ke selokan yang ada di pinggir jalan. Contohnya, saat sedang observasi jalan kabupaten masih ada saja sebagian dari masyarakat yang membuang sampah di selokan pinggir jalan raya, dan masyarakat tersebut tidak mengetahui perilakunya tersebut membuat meluapnya air sehingga terjadi genangan di jalan, tentunya jalan akan cepat retak dan berlubang.
3. Mobilitas meningkat disebabkan banyaknya kawasan industri di Sumedang sehingga meningkat pula kendaraan yang mengkut bahan industri yang kadang melebihi batas max beban yang telah ditentukan. Contohnya, truk max hanya bisa membawa 7-15 ton tapi sering kali terjadi mobil tersebut mengangkut lebih dari 15 ton

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi program unit reaksi cepat dalam pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic*. Karena, penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Menurut Sugiyono (2016) Metode kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik-teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah para pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang serta masyarakat pengguna jalan. Teknik Sampling yang digunakan untuk menentukan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Dengan demikian yang menjadi informan penelitian berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kepala Bidang Bina Marga, Kepala Seksi Reservasi Jalan, dan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan sedangkan pengolahan data menggunakan Model Miles dan Huberman yang terdiri dari *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi), dan Triangulasi (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Nugroho, 2004).

Dalam penelitian ini, dimensi yang digunakan sebagai alat ukur variabel implementasi adalah:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Sikap
4. Struktur Birokrasi (Edward III dalam Nugroho, 2004)

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga informan didapatkan gambaran mengenai implementasi program unit reaksi cepat dalam pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara Implementasi Program Unit Reaksi Cepat Dalam Pemeliharaan Jalan

No	Dimensi	Indikator	Hasil Wawancara
1	Komunikasi	Transmisi atau wahana	Ada banyak media pengaduan kerusakan jalan yang ditawarkan oleh Tim URC. Seperti berupa media sosial Instagram, Grup Whatsapp, Grup Line, Grup Telegram, Twitter dan Hotline (Bebas Pulsa), yang sengaja disiapkan saat peluncuran URC. Fasilitas ini diumumkan ketika launching URC yang menghadirkan seluruh camat dan kepala desa dimana wilayah mereka terlewati oleh jalan kabupaten. Dari mereka yang hadir dalam acara launching seharusnya mensosialisasikan kepada warganya agar dapat membantu memberikan informasi seputar kerusakan jalan.
		Konsistensi	Mempertahankan kondisi jalan, agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan lalu lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat. Artinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang

			<p>buruk dapat ditekan seminimal mungkin dan karena kondisi jalan yang baik para pengguna jalan akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya.</p> <p>Titik utama sasaran Program URC ini memfokuskan pada pengguna jalan agar mendapatkan kenyamanan dan keselamatan serta mempermudah perjalanan.</p> <p>Adanya sosialisasi ini untuk menambah wawasan masyarakat dan pengguna jalan mengenai program URC.</p>
		Kejelasan	Semua pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta sasaran dari kebijakan telah paham dan jelas apa itu program URC (Unit Reaksi Cepat)
2	Sumberdaya	Sumber daya manusia	Setiap SDM yang akan melaksanakan suatu program ataupun yang akan melaksanakan suatu tugas pasti akan melewati suatu tahapan penyeleksian sehingga mereka dikatakan pantas dalam melaksanakan suatu tugas atau suatu program.
		Sumber daya perencanaan	Bidang bidang yang tergabung dalam pelaksanaan program URC (Unit Reaksi Cepat) ini antara lain : UPTD wilayah Tanjungsari, Cimanggung, Kota SMD, Cimilaka, Situraja, Darmaraja, Wado, Tomo, Tanjungkerta, Conggeang Labotarium,dan peralatan.”
		Dana	Dana atau anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan program URC tersebut berasal dari APBN kemudian dan tersebut masuk ke Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dan akan diberikan dan dikelola oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR di tiap-tiap kota di setiap provinsi untuk program URC
		Sarana dan Prasarana	Sarana dan prasarana yang mendukung atau yang digunakan dalam pemeliharaan jalan berupa alat-alat seperti mesin gilas, genset, alat pemotong beton dan alat-alat bantu.
3	Sikap	Tingkah laku atau perfektif para pelaksana	Sikap dari masyarakat dalam mengetahui program pemeliharaan jalan begitu baik mendukung adanya kegiatan program tim URC, khususnya masyarakat pengguna jalan yang begitu antusias membantu hal kecil.
4	Struktur Birokrasi	SOP	Program pelaksanaan URC sudah sesuai dengan SOP yang ada, karena SOP inilah faktor keberhasilan program apabila tidak sesuai SOP akan berdampak buruk dan program tidak berjalan dengan baik dan cepat.
		Pembagian Kerja	Pembagian kerja di buat oleh seksi pemeliharaan. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan dengan pembagian kerja membagi tugas agar tugas dapat terselesaikan dengan cepat dan benar.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan program unit reaksi cepat dalam pemeliharaan jalan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa hal seperti masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya program unit reaksi cepat dalam hal pemeliharaan jalan di Kabupaten Sumedang. Selain itu, kurang lengkapnya sarana dan prasarana mengakibatkan proses pemeliharaan jalan tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Sebagaimana yang dijelaskan Sunggono dalam Sobarna (2019) bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi yaitu:

1. Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
3. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Pembagian Potensi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan pembatasan yang kurang jelas

SIMPULAN

Implementasi program Unit Reaksi Cepat Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan baik, meskipun dari segi ukuran dan tujuan kebijakan sudah jelas, namun ukuran dan tujuan kebijakan belum diterapkan secara maksimal yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang lalai dengan membuang sampah sembarangan sehingga bisa menimbulkan air menguap dan banjir ke jalanan yang nantinya akan merusak jalan. Sumber daya manusia yang masih rendah, anggaran yang tersedia terbatas, sarana/prasarana masih kurang.

Adapun faktor penghambat dalam Implementasi Program URC Unit Reaksi Cepat Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Sumedang diantaranya yaitu: Distribusi penyebaran informasi belum disebarluaskan secara merata, cuaca yang kadang tidak mendukung karena jika cuaca sedang hujan pelaksanaan program ini tidak bisa dilakukan, jika dipaksakan pun pasti tidak akan maksimal hasilnya dan daya tahan jalan pun tidak akan lama. Sarana dan prasarana masih kurang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Program Unit Reaksi Cepat Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut : menyampaikan informasi dengan baik dan benar di setiap media social maupun kepada setiap kepala desa ataupun camat di kabupaten sumedang. Agar informasi yang sampai kepada masyarakat jelas dan dapat dipahami, menunjang fasilitas yang memadai yaitu dengan anggaran yang cukup supaya fasilitas dan bahan bakunya tersedia dengan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2002. Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah. Bandung: CV Maulana.
- Akmala, Cita Fauziatul. 2017. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Diakses pada 21 Desember 2020, dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/27739/>
- Atmosudirjo. S. Prajudi. 1982. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dilla Seviana Fakultas. 2012. Upaya Pemeliharaan Jalan Kabupaten Melalui Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) Dalam Mewujudkan Responsivitas Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik. S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya : Diakses pada 30 Desember 2021, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230717918.pdf>
- Fahmi. Irham. 2013. Perilaku Organisasi: Teori, aplikasi Dan Kasus. Bandung: Alfabeta.
- Gie, The Liang. 1997. Ilmu Administrasi: Pengertian, Kedudukan dan Perincian. Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu Administrasi.
- Handyaningrat, Soewarno. 1984. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Herry Suharyadi Mohamad Aji Insani. 2015. Manajemen Pemerintahan Dalam Program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan Di Kota Bandung Tahun 2015 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran: Diakses pada 30 Desember 2021, dari <https://core.ac.uk/download/pdf/291660934.pdf>
- Ibrahim, Amin. 2007. Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: Aditama.
- Keban. Yermias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep,Teori,Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Siagian, Sondang P, 1998. Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi aksara.
- Siagian, Sondang P. 2004. Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2015. Filsafat Administrasi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Bumi.
- Silalahi, Ulbert. 2013. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: UGM.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Gafindo Perasada.